

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara sedang berkembang yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. namun sebagian wilayah yang ada diindonesia termasuk provinsi Banten rakyatnya masih tergolong miskin. Kemiskinan di Indonesia terjadi karena dilatar belakanginya oleh banyak hal, antara lain yaitu kesempatan kerja yang kurang menyebabkan masyarakat sulit mencari pekerjaan, untuk sekedar mengentaskan dirinya dari kemiskinan banyak juga yang mempunyai pekerjaan namun upah yang diterima tidak cukup.

Sumber daya manusia yang masih dibawah standar juga melatar belakanginya masalah kemiskinan ini, masyarakat miskin tidak mempunyai keahlian khusus karena tidak berpendidikan ataupun tidak pernah mengikuti pelatihan tertentu, selain itu pengalaman masyarakat miskin juga tidak banyak. Hal itu tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Program-program pemerintah yang dijalankan berorientasi kepada kesejahteraan

masyarakat yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Sejak era krisis ekonomi Tahun 1998, Program Bantuan Sosial (bansos) secara berkelanjutan tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemerintah. Pada awalnya bansos diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya kesempatan kerja, berkurangnya penyediaan fasilitas sosial bidang kesehatan dan pendidikan, dan menurunnya ekonomi masyarakat.¹

Dengan kondisi tersebut timbul masalah ekonomi, seperti kemiskinan. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah singkat.²

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan social serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan

¹Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*,(Bandung:Fokus media 2012),1

² Drs. H. Hartomo,dkk, *MKDU Ilmu Sosial Dasar*,(Jakarta:Bumi Aksara 2004),329

agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (Ratas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016). Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Ratas diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan).

Secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomitanggal 16 maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan kepada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dampak berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima bantuan pangan non tunai.

Program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset

melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, dan e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya.³

Jarak e-warong dari rumah peneliti yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ km.

Jumlah keluarga penerima manfaat di Kelurahan Grogol berdasarkan data dari Kelurahan Grogol Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Grogol sebanyak 82 orang dengan data sebagai berikut :⁴

Tabel 1.1 Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai

NO	Nama Desa	Jumlah KPM	Persentase
1	Cikebel Bawah	13	15,8 %
2	Ciora Wetan	4	4,9 %
3	Ciora Gede	6	7,3 %
4	Kubang Kair	5	6,1 %

³ Kementerian Lintas Sektor, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2016), 2-3

⁴ Data KPM BPNT Kelurahan Grogol Tahun 2018

5	Ciora Jaya	9	10,9 %
6	Cipinang Hilir	2	2,4 %
7	Kubang Koru	8	9,8 %
8	Cikebel Atas	14	17,1 %
9	Ciora Tengah	8	9,8 %
10	Cipinang Atas	11	13,4 %
11	Ciora Kawista	2	2,4 %

Berdasarkan permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN GROGOL KOTA CILEGON”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif tentang pengaruh penyaluran bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin sebagai sarana untuk membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan bahan pangan khususnya beras. maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan grogol
- b. Bagaimana keefektivan program penyaluran bantuan pangan non tunai
- c. Upaya penyaluran bantuan pangan non tunai ini secara tepat kepada keluarga yang membutuhkan
- d. Keberhasilan tingkat program penyaluran bantuan pangan non tunai yang dilakukan di kelurahan grogol kota cilegon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal pangan.

Dari sekian masalah – masalah yang disebutkan diatas tentunya masih banyak masalah lainnya yang penulis tidak sebutkan point per point secara lengkap, oleh karena itu setiap permasalahan yang muncul dalam proses penelitian untuk di identifikasi lebih lanjut serta lebih terperinci.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas yang diteliti berdasarkan pada latar belakang penelitian adalah berdasarkan pada fenomena yang terjadi, diduga bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap peningkatan ekonomi.

Setelah mengetahui masalah – masalah tersebut diatas, maka timbul pertanyaan – pertanyaan diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Bantuan Pangan Non terhadap kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan Grogol Kota Cilegon ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Bantuan Pangan Non Tunai yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh penyaluran bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin dikelurahan grogol kota cilegon
2. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap bantuan pangan non tunai yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga miskin dikelurahan Grogol Kota Cilegon

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam wawasan dalam teori maupun praktik, sekaligus memahami apakah pengaruh adanya bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin di kelurahan grogol kota cilegon.

2. Bagi akademik

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang lain, yang praktis dilakukan sehingga segala kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah sebagai saran untuk mengambil kebijakan agar terciptanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini menambah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan bagi pembaca

F. Kerangka Pemikiran

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program ini di laksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin dan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, ada pangan, sandang dan papan. Inilah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan papan menjadi keharusan negara dan pemerintah untuk memenuhinya. Untuk hal ini, negara harus bersedia membuka berbagai peluang (lapangan kerja, program pengentasan kemiskinan, buta aksara)

untuk menyediakan kebutuhan rakyat Indonesia dalam satu lapangan yang dapat terjangkau (rakyat Indonesia memenuhi pasar kerja) oleh masyarakat Indonesia. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya karena permasalahan ekonomi belaka, tetapi kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional.

Sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya mampu dari kemiskinan, kebodohan, kekuatan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir ataupun batin.

Menurut Praptokoesomo, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁵

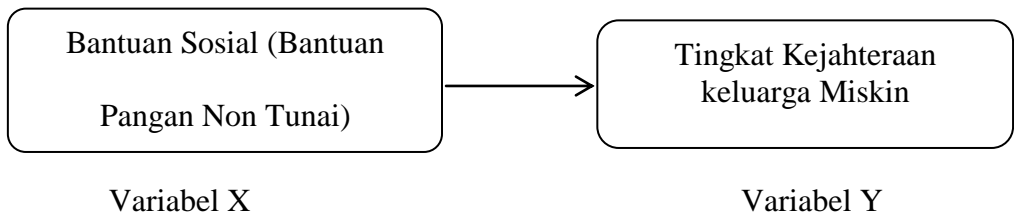
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan sosial (bantuan pangan non tunai) dikelurahan Grogol di Kota

⁵ Adi Fahrudi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refieka Aditama, 2012), 9

Cilegon Banten. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas.

Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan dalam model ini sebagai berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin



G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun kedalam lima bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitain ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai penjelasan pengertian bantuan pangan non tunai, kesejahteraan sosial, keluarga, kemiskinan, ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan bantuan pangan non tunai, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, bentuk dan jenis kemiskinan, dan penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan operasional variabel.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan simpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Sosial

1. Bantuan Pangan Non Tunai

Kondisi yang timbul dari masalah ekonomi, seperti kemiskinan, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah singkat.⁶

Program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan pangan secara non tunai melalui system perbankan juga

⁶ Drs. H. Hartomo, dkk, *MKDU Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), 329

dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat memalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, dan e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya.⁷

Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank.⁸

E-warong adalah istilah yang digunakan dalam program bantuan pangan non tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan

⁷ Kementrian Lintas Sektor, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2016), 2-3

⁸ Kementrian Lintas Sektor, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2016), 4

pangan oleh keluarga penerima manfaat, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, atau usaha eceran lainnya.

Kementrian sosial menyatakan bahwa program bantuan pangan non tunai merupakan kelanjutan dari program keluarga harapan (PKH).⁹

Akun elektronik bantuan pangan non tunai adalah sub-akun (e-wallet) bantuan pangan yang merupakan bagian dari rekening tabungan yang berkarakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Alat pembayaran elektronik yang selanjutnya disebut Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media berbagai bantuan sosial. Bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai ini adalah beras dan telur.

⁹ <https://infonawacita.com/kemensos-siapkan-bantuan-pangan-beras-dan-telur/>, diakses 21 januari 2018

Gambar 2.1 Kartu Kombo

Data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PFM) ditetapkan oleh kementerian sosial, data tersebut memuat tentang informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah. Kelompok kerja pengelola yang selanjutnya disebut pokja data adalah pengelola data terpadu yang mengusulkan daftar KPM (keluarga penerima manfaat) dan perubahannya untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Dasar hukum yang berkaitan adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 63 tahun tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.¹⁰

a. Tujuan Program Bantuan Non Tunai

Tujuan program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan
2. Membentuk nutrisi yang seimbang kepada penerima manfaat
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan
5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

¹⁰ Kementerian Lintas Sektor, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2017), 4

b. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Manfaat program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
 - 1) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.¹¹

c. Prinsip Umum Bantuan Pangan Non Tunai

Prinsip umum program bantuan pangan non tunai adalah sebagai berikut :

¹¹ Kementerian Lintas Sektor. op.cit., 6

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) yang sesuai
3. Mendorong usaha ecern rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat.¹²

2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

2.1 Penerima Manfaat

Penerima Manfaat BPNT merupakan Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM).

DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data. Pokja Data terdiri dari Kementerian

¹² Kementerian Lintas Sektor.op.cit., 7

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kementerian Sosial), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar KPM BPNT disampaikan oleh Menteri Sosial pada setiap bulan November. Data KPM *by name by address* selambat-lambatnya diserahkan ke bank dua (2) minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi acuan bagi Bank Penyalur untuk membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan menyiapkan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai.

Daftar KPM memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama Pasangan Kepala Keluarga (Calon Pemilik Rekening)
2. Nama Kepala Keluarga

3. Nama Anggota Keluarga lainnya
4. Alamat Tinggal Keluarga
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (jika ada)
6. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM
7. Kode Unik Individu dalam DT-PPFM
8. Nama Gadis Ibu Kandung
9. Nomor Peserta PKH

Nama calon pemilik rekening diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai Kepala Keluarga atau Pasangan Kepala Keluarga. Apabila ada perempuan dalam keluarga penerima, diperlukan surat keterangan lurah/kepala desa setempat untuk menginformasikan penggantian saat registrasi.¹³

Mengenai Kepesertaan :

1. Terkait Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), apabila ada penerima KKS tidak terdapat dalam Daftar KPM dan merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor

¹³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta, 2017), 15-16

mengikuti proses SLRT/MPM/sistem pengaduan resmi lainnya (mekanisme dijelaskan dalam Pedoman Pengaduan).

2. Terkait kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak semua peserta PBI-JKN akan mendapatkan bantuan pangan karena sasaran program bantuan sosial pangan lebih kecil dari sasaran PBI-JKN. Apabila penerima PBI-JKN merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor mengikuti proses SLRT/MPM/sistem pengaduan resmi lainnya (mekanisme dijelaskan dalam Pedoman Pengaduan).
3. Berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), apabila Keluarga dari Anak Pemilik KIP yang datanya tidak terdapat dalam Daftar KPM merasa berhak memperoleh BPNT, maka dapat melapor mengikuti proses SLRT/MPM/sistem pengaduan resmi lainnya (mekanisme dijelaskan dalam pedoman terpisah).

Kepesertaan KPM di dalam program BPNT dapat berganti

karena:

1. Meninggal dan berasal dari calon KPM beranggota tunggal
2. Berasal dari calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain

3. Berasal dari calon KPM yang menolak/mengundurkan diri sebagai
4. KPM dan
5. Tercatat ganda atau lebih

2.2 Manfaat Bantuan

Setiap KPM akan memperoleh manfaat BPNT sebesar Rp.110.000/KPM/bulan. Bantuan tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warong. Pemilihan komoditas beras dan/atau telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.¹⁴

2.3 Pagu

Pagu Penerima BPNT Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga. Pemerintah provinsi dan

¹⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia.op.cit., 17

Kabupaten/Kota dapat menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosial untuk menambah Pagu Penerima BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam Daftar KPM, sesuai dengan kemampuan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan. Mekanisme BPNT dengan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran Program BPNT dengan pembiayaan APBN.

3. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

3.1 Persiapan Pelaksanaan

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di

lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Koordinasi dengan Bank Penyalur untuk hal-hal berikut:

1. Menyepakati Proses Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial. Data BNBA minimum memenuhi persyaratan Customer Due Diligence/Know Your Customer (KYC) yang disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai;
2. Menyepakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program;
3. Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi E-warong dengan jenis usaha;
4. Menyepakati proses Penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari rekening kas umum negara kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang

diterbitkan, untuk memudahkan informasi di tingkat Penerima bantuan Sosial dan pemilik E-warong.

5. Menyetujui waktu pencairan dana kepada rekening KPM.
6. Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.¹⁵

3.2 Penyampaian Data Penerima Manfaat

Pagu setiap wilayah penyaluran BPNT 2018 merujuk pada Keputusan Menteri Sosial selaku pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan Tim Pengendali tentang Penetapan Alokasi pagu bantuan pangan tahun 2018. Penyampaian data by name by address untuk Penyaluran BPNT bersumber dari DT-PPFM, yang disiapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur oleh KPA di Kementerian Sosial.

¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia.op.cit., 20

3.3 Pembentukan E-Warong

Setelah diketahui jumlah sebaran KPM sampai level desa/kelurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi E-warong penyalur BPNT dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
3. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
 1. Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.
 2. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *E-warong* penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran *E-warong* di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut *E-warong* dengan rasio *E-warong* dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) *E-warong* dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio *E-warong* dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada *E-warong*, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.

- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas *E-warong* dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo.
- e. Menyediakan petugas bank (*Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh *E-warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- f. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar *E-warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.¹⁶

3.4 Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT.

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia.op.cit., 22

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
2. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
3. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.

Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:

1. Kementerian/Lembaga terkait;
2. Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan;
4. Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya;
5. Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa;

6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
7. Pemilik/Pengelola E-warong;
8. Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik di tingkat pusat maupun cabang;
9. Masyarakat umum.

3.5 Penyaluran Dana Bantuan Non Tunai

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

1. Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.

2. Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Pelaksanaan pemindah bukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM dilakukan setelah rekening tersebut dinyatakan selesai proses pembukaannya oleh Bank Penyalur (sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pembukaan rekening tabungan dan uang elektronik). Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulan sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.
3. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial. Rekening tersebut dapat diakses melalui Kartu Kombo.
4. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum

Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.

5. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
6. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
7. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
8. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
9. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.¹⁷

¹⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia.op.cit., 33-34

3.6 Pemanfaatan Dana Bantuan Non Tunai

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Datang:** KPM membawa Kartu Kombo datang ke *E-warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur.
2. **Cek:** Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
3. **Pilih:** Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
4. **Terima:** Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

Gambar 2.2 Gambar Pemanfaatan Bantuan



Mekanisme pemanfaatan bantuan pangan non tunai :

a. Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada E-warong

1. Pembelian Bahan Pangan dilakukan pada *E-warong* yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur di wilayah KPM.
2. KPM mendatangi *E-warong* untuk membeli Bahan Pangan dengan memanfaatkan Kartu Kombo.
3. KPM berhak memilih *E-warong* yang dikehendaki untuk mencairkan bantuan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4. KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.
5. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan dibeli.
6. *E-warong* tidak melakukan pemaketan barang.
7. KPM dapat mencari agen lain yang menjual barang dengan harga murah dan dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/kelurahan atau saluran pengaduan lain saat ada kenaikan harga yang tidak wajar

b. Bukti Transaksi Bantuan Pangan

1. Bank Penyalur menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan yang dapat berupa cetak resi dari mesin EDC, atau lainnya.
2. KPM dan *E-warong* menyimpan bukti transaksi.
3. Bukti transaksi memuat informasi sisa jumlah dana yang masih tersedia pada rekening KPM.¹⁸

B. Konsep Kesejahteraan Keluarga Miskin

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Praptokoesomo, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.¹⁹

¹⁸ Kementrian Sosial Republik Indonesia, .op.cit., 34-35

¹⁹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama 2012), 9

a. Tujuan kesejahteraan

- 1) untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²⁰

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemertaan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

²⁰ Adi Fahrudin, Ph.D, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Bandung: Reflika Aditama 2012),9-10

b. Tingkat Kebutuhan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih dan peningkatan pendidikan.

- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu :²¹

- a. Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi
- b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih sesuatu yang dapat emningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktivitas ekonomi
- c. Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang

²¹ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: Prestasi Pustaka 2008),111-112

dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi

- d. Diperlukan peran pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi

b. Definisi keluarga

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “keluarga”. Keluarga itu berarti ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau seisi rumah, bisa juga di sebut *batih*, yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara atau kaum kerabat.

Definisi lain mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang diekat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama.²²

2. Indikator Kesejahteraan

²² Ramdani Wahyu, M.Ag., M.Si, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), 70

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut para ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok :

1. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
2. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap Negara

3. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.²³

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

- a. BAPPENAS

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, begitupun sebaliknya.

- b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber

²³ Pratiwi Rafika, "Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)", 23-24

air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, pendidikan, frekuensi makan setiap hari, membeli pakaian, menabung, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.

c. BKKBN

Menurut BKKBN ada beberapa indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera, yaitu: anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator menurut BKKBN.

²⁴ Pratiwi Rafika, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)”, 25-26

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Besar keluarga ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota keluarga. Berdasarkan jumlah atau besar keluarga, keluarga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: keluarga kecil (kurang dari sama dengan 4 orang), keluarga sedang (5-7 orang), dan keluarga besar (lebih dari sama dengan 8 orang).

Menurut arianti (2002) mengungkapkan bahwasanna , besar keluarga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga. Biasanya jumlah anak. Jumlah anggota keluarga yang terlalu besar seringkali menimbulkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Sumarwan (2003) menyatakan bahwa pendapatan perkapita dan belanja pangan keluarga akan menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah keluarga. Jumlah dan pola konsumsi suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah anggota keluarga atau rumah tangga. Keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar akan mengkonsumsi pangan dengan

jumlah jauh lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang jumlah anggota keluarganya lebih sedikit.²⁵

Adapun tujuan dan fungsi keluarga adalah :

Tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur atau hierarkis yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya dan untuk memelihara kebiasaan atau budaya masyarakat yang lebih luas. Dalam mencapai tujuan keluarga, peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN 1996) menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalani oleh keluarga, meliputi:

- 1) Fungsi keagamaan yaitu keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

²⁵ Megawati Simanjuntak, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27013> (diunduh tanggal 13 Maret 2018), 23

- 2) Fungsi sosial budaya yaitu memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu keasatuan.
- 3) Fungsi melindungi yaitu untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
- 4) Fungsi cinta kasih yaitu keluarga yang memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh kasih lahir dan batin.
- 5) Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu dengan memberi peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan.
- 6) Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.²⁶

²⁶ Megawati Simanjuntak, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27013> (diunduh tanggal 13 Maret 2018), 7-8

Kesejahteraan keluarga miskin adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan keluarganya yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga.²⁷

Di mata sebagian ahli, kemiskinan didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup.

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan

²⁷ Megawati Simanjuntak, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)," <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27013> (diunduh tanggal 13 Maret 2018), 10

oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan dengan secara kuantitatif atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian, karena biaya hidup di daerah kota dan di daerah desa berbeda, demikian juga antar kelompok masyarakat didalamnya.

Di samping itu, ada juga pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan oleh Sajogyo. Dikatakan bahwa, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja

dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Adapun definisi menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.²⁸

Kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan adalah para pekerja pabrik dan rumah tangga yang beberapa tahun belakangan ini kondisi ekonomi mereka membaik akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

²⁸ Dr. Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-TRANS 2013),1-4

berkelanjutan yang menciptakan kesempatan kerja lebih besar dan lebih baik (dari sisi pendapatan), namun mereka berada persis di atas garis kemiskinan yang berlaku. Kondisi seperti ini membuat mereka sangat terancam kembali menjadi miskin apabila ada sebuah krisis ekonomi seperti pada tahun 2008-2009.²⁹

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu:

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga

²⁹ Prof. Dr. Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2014), 196

kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkatan pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar.
4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah perdesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalau pun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian.
5. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan.³⁰

Berdasarkan bank dunia seseorang dikatakan miskin apabila pengeluarannya yaitu USD 1,9 dalam sehari, dalam kurs saat ini 1 dollar = Rp.14.940,25

³⁰ Dr. Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-TRANS 2013),6

3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat

sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata acar modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya kebebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan perkapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat disuatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi utuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.³¹

4. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang

³¹ <http://bps.go.id/dalam-angka/> diakses tanggal 9 maret 2018

berjumlah 47,97 juta atau sekitar 23,43% pada tahun 1999 menjai 30,02 juta atau sekitar 12,49% pada tahun 2011.

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, ditingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Tahiland, Cina, Dan Brasil yang hanya berada dikisaran 0,1% per tahun.³²

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemebrdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah pusat maupun daerah.

³² <http://www.tnp2k.go.id/id/program-penghentas-kemiskinan-indonesia/diakses> tahun 2018

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, presiden telah mengeluarkan Perpers No.15 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat peneurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Menyempurnakan program perlindungan sosial
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- c. Pemberdayan masyarakat, dan
- d. Pembangunan yang inklusi

Terkait dengan strategi tersebut, pemerintah telah menetapkan instrument penanggulangan kemiskinan , diantaranya adaalah program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga .

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta

perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar tersebut memprioritaskan pada pemenuhan atas hak pangan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi, dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program ini ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jenis program yaitu : Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (Merah Keluarga Sejahtera), Raskin (beras untuk keluarga miskin), Dan Program Indonesia Pintar.³³

D. Hubungan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan Kesejahteraan Keluarga Miskin

Pelaksanaan pembangunan untuk dapat pemeratakan pendapat masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa kontribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatan kepada masyarakat dalam upayanya untuk

³³ Pratiwi Rafika, “*Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)*”, 53-54

meningkatkan pendapatan perlu diciptakan.³⁴ Salah satu upaya tersebut ialah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat yang dikenal dengan istilah KPM-BPNT (keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai) yang dilaksanakan sejak 2017 dan diberlakukan sistem perbankan.

Salah satu program pemerintah, Rastha diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan). Dalam hal ini bantuan pangan yang diberikan yakni beras dan telur, penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Tujuan program bantuan pangan non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong

³⁴ Panggauh Singgih, “Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Study di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”, 27

usaha eceran rakyat (e-warong), serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran.

Dengan demikian terlihat adanya hubungan antara penyaluran bantuan pangan non tunai dengan kesejahteraan keluarga miskin.

E. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada skripsi yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkas tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada. Berikut ini beberapa skripsi penelitin terdahulu.

Berikut merupakan hasil *review* terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya:

1. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian yang di lakukan oleh Kurniawan dari Universitas Mulawarman tahun 2016 yang berjudul “Mekanisme Penyaluran Dana Program KKS(Kartu Keluarga Sejahtera) di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. Penelitian terdahulu ini menggunakan

analisis data kualitatif berbeda halnya dengan penelitian sekarang, dan perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu tidak ada variabel Y sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel Y. Sedangkan permasamaan adalah variabel X membahas tentang penyaluran dana program pemerintah, yaitu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Bantuan pangan non tunai ini upaya mereformasi program subsidi Rastra (rakyat sejahtera). Bahwasannya penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran dana program kks(kartu keluarga sejahtera) di kelurahan gunung lingai kecamatan sungai pinang kota samarinda berjalan kurang baik ketika memberikan himbauan kepada masyarakat agar memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat dengan memberikan penjelasan –penjelasan, mampu menjelaskan prosedur-prosedur.

2. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Winria Pita purwati dari Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”. Pada penelitian terdahulu menggunakan

penelitian deskriptif kualitatif berbeda halnya dengan penelitian sekarang yang menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang sama saja. Bantuan beras miskin sama halnya dengan bantuan pangan non tunai, karena bantuan pangan non tunai ini mereformasi dari program bantuan beras miskin, bantuan yang diberikan sama saja dalam hal pangan, akan tetapi namanya saja yang berbeda dan pada bantuan pangan non tunai ini, bantuan yang diberikan bukan saja beras, akan tetapi ada pendamping lainnya, yaitu telur. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel X, dan target sarannya pada keluarga miskin. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Y. Bahwasannya penelitian ini didasarkan atas 6 indikator, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dari hasil perhitungan 6 indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran raskin di kecamatan sumarorong kabupaten mamasa belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data rumah tangga sasaran penerima raskin dan

rendahnya pengetahuan akan prosedur dan tujuan pelaksanaan penyaluran raskin baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana penyaluran raskin.

F. Penentuan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji secara empiris.³⁵

Jika didasarkan pada rumusan masalah maka hipotesis dalam penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kecamatan Grogol Kota Cilegon.

H₁: Terdapat Pengaruh Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon

³⁵ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013),34

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di rumah-rumah setiap keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten, dengan mengadakan wawancara, responden, dengan para keluarga yang menerima bantuan pangan non tunai. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah keluarga miskin kelurahan Grogol Kota Cilegon yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Waktu penelitian dimulai dari 10 januari 2018 sampai dengan 30 september 2018

B. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu: Cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.³⁶

³⁶ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012),1.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon, penulis melakukan penelitian di Kelurahan Grogol Kota Cilegon.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.³⁷

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁸ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah keluarga miskin yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai yang berjumlah 82 orang.

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah

³⁷ Muslich Ansori, dan Sri Iswati *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Surabaya: Air Langga University Press, 2009), 12.

³⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 61.

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dan yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.³⁹ Dalam penelitian, sampel ini di ambil dari seluruh jumlah populasi yaitu berjumlah 82 orang. Karena apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴⁰ Kita mengenal metode wawancara, pengamatan, angket, pengetesan, arsip, dan dokumen. Yang disebutkan dua terakhir lebih mengacu kepada sumber data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 109.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 100

berbagai seting, sumber, dan berbagai cara.⁴¹ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Sumber data adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan data yang diperlukan. Teknik Wawancara memakan waktu dan biaya yang sangat besar untuk sampel yang cukup besar dan tersebar. Wawancara berarti komunikasi antara pewawancara dan orang yang diwawancara, hal ini cenderung menimbulkan perbedaan interpretasi antara keduanya. Namun, dengan wawancara dapat diperoleh informasi lebih lengkap.⁴²

2. Angket atau Kuisisioner

Angket atau Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan dibuat dengan bahasa

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁴² Tasbita, *Asiknya Belajar Statistika*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2011), 16

sederhana yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat pendek dengan maksud yang jelas.⁴³

Kelebihan kuesioner dari wawancara ialah sifatnya yang praktis, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Kelemahannya ialah jawaban sering tidak objektif, lebih-lebih pertanyaannya kurang tajam yang memungkinkan responden berpura-pura.⁴⁴

3. Study Pustaka

Study pustaka dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mencari yang berkaitan untuk memperkuat penelitian dengan mengumpulkan buku-buku dan jurnal.

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.⁴⁵ Data digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.

⁴³ Tasbita.op.cit., 17

⁴⁴ Tasbita.op.cit., 17

⁴⁵ Tasbita.op.cit., 10

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer , yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (suatu organisasi/perusahaan).⁴⁶

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari jawaban subyek peneliti atau responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada keluarga miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden keluarga miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon.

F. Identifikasi Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

⁴⁶ Tasbita.op.cit., 10

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷

1. Variabel Independent

Variabel independen sering disebut variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yaitu Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (variabel independen (**X**))

2. Variabel Dependent

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yaitu Kesejahteraan Keluarga Miskin (variabel dependen (**Y**)).

G. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan ada

⁴⁷ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 3-4.

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.⁴⁸

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.⁴⁹

H. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut lebih baik kita pakai beberapa rumus yang

⁴⁸ Sunyoto Danang, *Praktik SPSS Untuk Kasus*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114

⁴⁹ Sunyoto Danang, op.cit., 110

telah diuji keterandalannya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov maupun Lillifors.⁵⁰

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.⁵¹

1. Analisis Grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

⁵⁰ Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar Aplikasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 272.

⁵¹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, (Semarang : Badan Penerbit – Undip, 2011), 160.

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.⁵²

2. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua variabel pengamatan/observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastis. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastis dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedastis. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan melihat *scatterplot* serta melalui/menggunakan uji geltjer, uji park dan uji white. Uji

⁵² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, (Semarang : Badan Penerbit – Undip. 2011), 161.

heterokedastisitas yang paling sering digunakan adalah uji *scatterplot* yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁵³

Dasar pengambilan keputusan:

- 1) Ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis data regresi linier sederhana. dan instrument (alat) yang digunakan adalah aplikasi (*software*) yaitu *statistic product and service solution* (SPSS) versi 25.0 dan *Microsoft Excel*.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut

⁵³ Haryadi Sarjono, Winda Julianita, *SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*, 66.

variabel dependen sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau variabel independen.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.⁵⁴

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y(topi) : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (kesejahteraan keluarga miskin)

a : Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen . bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

⁵⁴Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 261.

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. (penyaluran bantuan pangan non tunai)

J. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif bila datanya interval dan rasio.⁵⁵ Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Adapun hipotesisnya yaitu :

$$H_0 = b_1 = 0$$

Yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$$H_0 = b_1 \neq 0$$

Artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel dependen terhadap variabel independen

Data yang tersedia dalam penelitian ini akan diolah dengan SPSS versi 25.0 uji t dua arah (*two tail*).

⁵⁵ Sugiyono.op.cit., 95.

Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji dua pihak berlaku ketentuan, bila harga t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 atau terletak diantara t_{tabel} , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian jika $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ maka H_0 terima. Harga t_{hitung} adalah mutlak, jadi tidak dilahat (+) dan (-) nya.⁵⁶

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

H_0 : Tidak adanya pengaruh antara variabel independent dan variabel dependent.

H_1 : Adanya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen.

2. Menentukan Tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Tingkat signifikansi 0,05 adalah ukuran yang sering digunakan dalam penelitian

3. Menentukan t hitung

T hitung dapat di dapat dari *output* SPSS.

⁵⁶Sugiono.op.cit., 99.

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 10\%:2 = 0,05\%$ (Uji dua sisi) dengan menghitung derajat kebebasan (df) $n-k-1$ dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah jumlah variabel independen.

5. Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: Tidak ada pengaruh

Ho ditolak apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$: Ada pengaruh

6. Pengujian hipotesis :

$H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap dependen.

$H_1 : \beta \neq 0$, ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel independen.

Pada uji t, nilai propabilitas dapat dilihat dari hasil pengolahan SPSS pada tabel *coeffisients* kolom sig atau *significance*. Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\text{koefisien Regresi (bi)}}{\text{standar deviasibi}}$$

Sedangkan untuk nilai t tabel dapat dicari menggunakan tabel distribusi t dengan cara taraf signifikansi $\alpha = 10\%$ atau $0,1/2 = 0,05$ atau 5% dua arah.

Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui SPSS statistik parametrik sebagai berikut :

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 (dua arah), maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan (H_1 diterima dan H_0 ditolak). Artinya secara parsial variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) sama dengan hipotesis diterima. Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (dua arah), maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan (H_1 ditolak dan H_0 diterima) , artinya secara parsial variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) dan hipotesis ditolak.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel.⁵⁷

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan hubungan yang terjadi antara variabel bebas (X) yaitu penyaluran bantuan pangan non tunai dan terhadap kesejahteraan keluarga miskin sebagai variabel antara (Y). Hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dinyatakan dalam bilangan. Bilangan yang menyatakan besar kecil hubungan itu disebut korelasi.

Uji korelasi belum dapat diketahui variabel penyebab akibat. Dalam analisis korelasi yang diperhatikan adalah arah (positif atau negatif) dan besarnya hubungan (kekuatan).⁵⁸

Tabel 3.1 Interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 -0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

⁵⁷Suharyadi dan Purwanto, *Statistika : Untuk Ekonomi Keuangan Modern: Edisi 2 Buku 2*. (Jakarta : Salemba Empat, 2015), 158.

⁵⁸ Tomi Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 52.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi akan terletak pada garis regresi akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna, namun apabila data observasi tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai bagian dari keragaman total variabel terikat Y (variabel yang dipengaruhi atau dependen) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang mempengaruhi atau independen).

Jadi koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independen) mempengaruhi variabel Y (variabel terikat). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y.

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan Koefisien Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari korelasi (r^2). Koefisien ini disebut koefisien

penentu. Varians yang terjadi pada variabel dependent dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi variabel independent.⁵⁹ Koefisien determinasi dinyatakan dengan persentase (%) yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Operasional variabel adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.⁶⁰

Tabel 3.2 Operasional Variabel (X) dan (Y)

Variabel	Definisi	Indikator	No.instrumen	Skala
Penyaluran bantuan pangan non tunai	BPNT menurut kementrian sosial adalah	1. Sistem penyaluran bantuan pangan non tunai teratur	1,2	Likert

⁵⁹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

⁶⁰ Sugiyono.op.cit., 239.

(independent)	<p>bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan pada /e-warong yang bekerja</p>	<p>dan tepat sasaran.</p> <p>2. Membantu memenuhi kebutuhan keluarga miskin.</p> <p>3. Memberikan nutrisi seimbang dalam hal pangan.</p> <p>4. Sebagai bentuk upaya perlindungan sosial dari pemerintah.</p> <p>5. memberikan akses jasa keuangan alat pembayaran elektronik.</p>	<p>3,4</p> <p>5,6</p> <p>7,8</p> <p>9, 10</p>	
---------------	---	---	---	--

	sama dengan bank.			
Kesejahteraan keluarga miskin (dependent)	Menurut arthur dunham adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan keluarganya yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal pangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan kondisi keluarga setelah menerima bantuan pangan non tunai. 2. Berkurangnya tingkat keluarga yang kekurangan akan pemenuhan kebutuhan pangan. 3. Tercukupinya penyediaan pemenuhan kebutuhan dalam hal pangan. 4. Adanya 	<p>1,2</p> <p>3,4</p> <p>5,6</p> <p>7,8</p>	<p>Likert</p> <p>(menurut sugiono skala ini digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial yang terjadi.</p> <p>Pertanyaan terdiri dari 1-5</p>

		<p>pemanfaatan pendapatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya</p> <p>5. Mensejahtera kan keluarga miskin.</p>	9, 10	
--	--	---	----------	--

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang akan dijadikan dalam penelitian yaitu dilakukan pada keluarga miskin atau yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai yang bertempat di kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten.

1. Sejarah Bantuan Pangan Non Tunai

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 maret 2016 memberikan arahan bhwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk

membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan.⁶¹

Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan kepada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dampak berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima bantuan pangan non tunai.

Program bantuan non tunai merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.⁶²

Dalam BPNT bantuan akan diberikan kepada keluarga miskin dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah

⁶¹ Kementerian Lintas Sektor, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2016), 2-3

⁶² Kementerian Lintas Sektor, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2016), 2-3

pelaksanaan yang berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PFM) yang nantinya akan dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin yang disebut pokja data. Nama calon pemilik rekening diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai Kepala Keluarga atau Pasangan Kepala Keluarga. Daftar KPM BPNT disampaikan oleh Menteri Sosial pada setiap bulan November. Data KPM *by name by address* selambat-lambatnya diserahkan ke bank dua (2) minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan kuota program per provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi acuan bagi Bank Penyalur untuk membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan penyiapan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai.

2. Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai di Grogol

Penyaluran bantuan pangan non tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui Bank Penyalur, Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial

dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.

Rekening KPM tersebut dapat diakses melalui Kartu Kombo. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada kementerian sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali, setelah itu bank penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana bantuan pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).⁶³

Penyaluran bantuan pangan non tunai di grogol terkadang tidak sesuai tanggal yang dijadwalkan. Keluarga penerima manfaat ini memang betul secara garis besar yaitu keluarga yang kurang mampu, bantuan ini diberikan mayoritas kepada wanita atau ibu rumah tangga, Jadi bantuan ini paling banyak yang menerima adalah nama istri dibandingkan suaminya. Ketika bantuan pangan non tunai akan cair, terlebih dahulu petugas bantuan pangan non tunai memberitahu melalui RT(rukun tetangga) masing-masing desa / kampung agar

⁶³ Kementrian Sosial Republik Indonesia.op.cit., 33-34

diberitahu kepada warganya yang menerima bantuan pangan non tunai tersebut, apabila keluarga penerima manfaat tidak mengetahui informasi tersebut, otomatis saldo tabungan itu akan tetap dan bisa diambil bulan depan.

Lokasi penyaluran bantuan pangan non tunai di grogol bertempat di link. Masigit yang disebut dengane-warong. Peraturan pada saat bantuan pangan non tunai dicairkan petugas menanyakan kartu yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat yaitu kartu kombo, kartu kombo harus di bawa setiap pengambilan / pencairan bantuan pangan non tunai. Kartu kombo berisi saldo yang nantinya akan ditukarkan dengan bantuan pangan yaitu berupa beras dan telur, saldo tersebut tidak dapat diuangkan hanya dapat ditukar dengan bantuan pangan saja.

Dalam hal ini adapun hasil wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan grogol kota cilegon dari Ibu Tuhiyah pada tanggal 31 Maret 2018, yakni:

“Bantuan pangan non tunai diberikan perbulan setiap tanggal 25, bantuan dari pemerintah ini hanya berupa pangan

saja, dan saya sangat berterimakasih karena untuk masalah pangan khususnya beras saya tidak mengeluarkan biaya lagi, yang pada akhirnya saya bisa menyisihkan uang yang saya dapat untuk keperluan lainnya. Bantuan yang saya terima beras dan telur. Tetapi bantuan ini juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan saya sehari-hari, namun beras yang diberikan untuk dimakannya enak dan bantuan kali ini ada berupa lauknya, setidaknya keluarga saya pun mendapat asupan nutrisi yang seimbang.”⁶⁴

Adapun hasil wawancara dari tokoh masyarakat mengenai tentang membaiknya masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai, Dari bapak ustadz atau tokoh masyarakat di kampung cipinang atas kelurahan grogol tanggal 5 april 2018, yakni:

“saya melihat ada perkembangan dari masyarakat yang tadinya kurang mampu untuk masalah pola makan yang seharusnya 3 kali sehari sekarang sudah terpenuhi, setelah ada program ini mereka cukup terbantu dalam ekonominya untuk

⁶⁴ Wawancara Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (Ibu Tuhiyah) tanggal 31 Maret 2018

memenuhi kebutuhan pangannya. Saya sering mendapat keluhan-keluhan dari masyarakat yang belum merasakan bantuan ini khususnya kampung sini yang berstatus janda. Yang saya tahu bantuan ini juga bergilir, apabila keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai sudah dianggap mampu, maka bantuannya akan dialihkan kepada yang lain yang berhak untuk menerimanya. Keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai ini bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain, dan saya harap kedepannya bisa merata kepada keluarga yang berhak menerimanya dan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada.”⁶⁵

Oleh karena bantuan pangan non tunai ini memiliki tenggang waktu tertentu kepada keluarga sangat miskin, maka bantuan pangan non tunai tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh keluarga penerima manfaat bantuan untuk mensejahterakan keluarganya.

⁶⁵ Wawancara Ustadz / tokoh masyarakat pada salah satu desa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai tanggal 5 April 2018

Tabel 4.1 Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai kelurahan grogol

No	Kelurahan	Jumlah keluarga penerima manfaat	Persentase
1	Laki-laki	4	4.88 %
2	Perempuan	78	95.12 %
	Jumlah	82	100%

Sumber: Data kelurahan grogol dalam angka 2018

3. Deskripsi Data

1. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti .⁶⁶

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari jawaban subyek peneliti atau responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada keluarga miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (suatu organisasi/perusahaan).⁶⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan angket untuk memperoleh data. Angket atau Kuisisioner adalah teknik

⁶⁶ Tasbita.op.cit., 10

⁶⁷ Tasbita.op.cit., 10

pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan dibuat dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat pendek dengan maksud yang jelas.⁶⁸

Dalam penelitian ini, angket yang disebarakan kepada keluarga penerima manfaat adalah jumlah semua populasi yaitu sebanyak 82 orang.⁶⁹ Populasi yang berjumlah 82 orang itu digunakan sebagai sampel, karena jumlahnya kurang dari 100 orang, maka dari itu semua populasi digunakan untuk mencari data (sampel jenuh).⁷⁰

2. Analisis statistik

1. Analisis Deskripsi Variabel

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dibuat oleh penulis, diperoleh data mengenai variabel Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (X) dan variabel Kesejahteraan Keluarga Miskin (Y) sebagai berikut:

⁶⁸ Tasbita.op.cit., 17

⁶⁹ kelurahan grogol kota cilegon

⁷⁰ Sugiono.op.cit., 5

Tabel 4.2 Data Skor Akhir Variabel Bantuan Pangan Non Tunai dan Kesejahteraan Keluarga Miskin

NO	X	Y
1	38	38
2	40	39
3	36	37
4	38	33
5	43	43
6	41	41
7	42	40
8	40	39
9	38	36
10	37	35
11	38	34
12	39	36
13	40	40
14	38	37
15	40	40
16	45	45
17	38	39
18	36	41
19	35	37
20	36	39
21	36	39
22	36	39
23	37	36
24	36	38
25	32	37
NO	X	Y
51	46	46
52	40	39
53	40	37
54	39	36
55	35	37
56	35	36
57	35	37
58	35	38
59	36	33

NO	X	Y
26	38	39
27	38	37
28	38	36
29	36	39
30	38	39
31	37	40
32	40	45
33	38	33
34	42	39
35	39	45
36	38	39
37	37	40
38	38	39
39	37	37
40	39	37
41	40	39
42	40	40
43	39	42
44	40	41
45	40	36
46	30	30
47	37	36
48	39	36
49	40	40
50	39	40
NO	X	Y
69	33	33
70	37	34
71	40	37
72	44	38
73	38	36
74	30	30
75	36	36
76	41	39
77	39	36

60	38	37
61	34	30
62	38	37
63	38	38
64	38	38
65	39	35
66	41	41
67	38	40
68	40	41

78	36	36
79	38	34
80	39	44
81	40	40
82	40	40
79	38	34
80	39	44
81	40	40
82	40	40

B. Uji Statistik

a. Evaluasi Kelayakan Model Analisis

1) Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Bantuan Pangan Non Tunai
Correlations

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	82
X.01	Pearson Correlation	,474**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.02	Pearson Correlation	,642**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.03	Pearson Correlation	,442**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.04	Pearson Correlation	,459**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82

X.05	Pearson Correlation	,458**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.06	Pearson Correlation	,525**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.07	Pearson Correlation	,327**
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	82
X.08	Pearson Correlation	,427**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.09	Pearson Correlation	,462**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
X.10	Pearson Correlation	,481**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82

Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Dari hasil pengukuran setiap pernyataan diperoleh hasil seperti diatas, dari 10 pernyataan semuanya valid. Validitas suatu item dilihat dari r hitung (total corelation) lebih besar dari r tabel, untuk mengukur tabel ditentukan dengan nilai df (degree of freedom) jumlah responden dikurangi 2 ($df=N-2$) maka diperoleh hasil 80. Dengan jumlah df 80 maka diketahui r tabel yaitu 0,2172. Semua pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Pernyataan diatas dapat mengukur

penelitian, maka pernyataan tersebut akan digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.601	10

Dari hasil pengukuran variabel penyaluran bantuan non tunai diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* 0,601. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Hal ini dapat diartikan bahwa data yang diterima menggunakan instrument kuisioner sebagai alat ukur adalah reliabel (handal).

Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Keluarga Miskin Correlation

Kesejahteraan Keluarga Miskin	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	82
Y.01	Pearson Correlation	,522**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.02	Pearson Correlation	,598**
	Sig. (2-tailed)	,000

	N	82
Y.03	Pearson Correlation	,468**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.04	Pearson Correlation	,431**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.05	Pearson Correlation	,504**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.06	Pearson Correlation	,605**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.07	Pearson Correlation	,409**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.08	Pearson Correlation	,557**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.09	Pearson Correlation	,533**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82
Y.10	Pearson Correlation	,414**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	82

Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Dari hasil uji validitas variabel kesejahteraan keluarga miskin tidak terdapat pernyataan yang tidak valid karena semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,2172).

Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas Variabel Kesejahteraan Keluarga Miskin
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.659	10

Dari hasil pengukuran variabel kesejahteraan keluarga miskin diperoleh nilai *Croanbach's Alpha* 0,659. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang diterima menggunakan instrument kuisisioner sebagai alat ukur adalah reliabel (handal).

2) Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,516	3,818		2,492	,015
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	,745	,100	,641	7,462	,000

Dependent Variable: Kesejahteraan Keluarga Miskin

Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel di atas maka diperoleh persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

$$Y = 9,516 + 0,745 X$$

Regresi linear sederhana digunakan untuk menjelaskan pengaruh Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X) terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin (Y) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Persamaan regresi linear sederhana di atas, dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi variabel Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X) diperoleh sebesar 0,745 bernilai positif yang berarti memiliki pengaruh positif sehingga apabila semakin tinggi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai maka akan semakin tinggi pula Kesejahteraan Keluarga Miskin.

b. Uji Asumsi Klasik

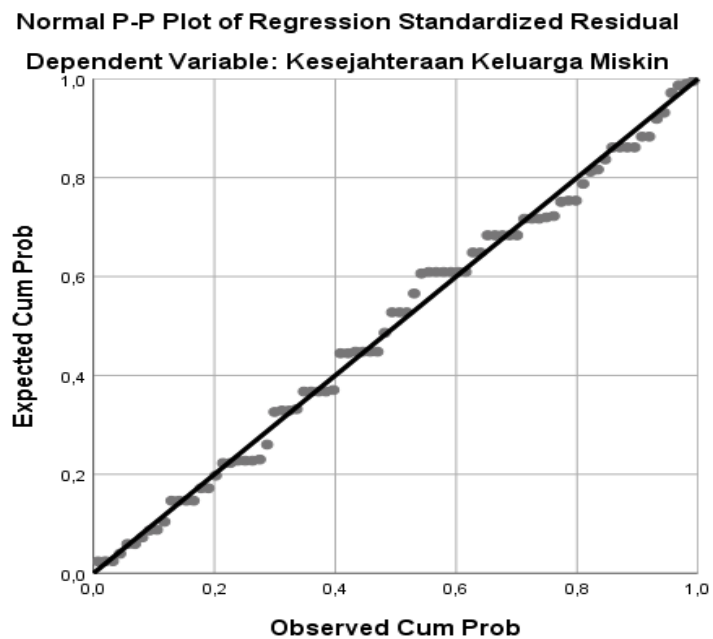
1) Normalitas

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, digunakan uji grafik p-plot. Untuk uji statistik dan titik-titik plot tersebar di sekitar garis diagonal untuk uji grafik p-plot. Hasil

pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Dibawah ini merupakan hasil uji normalitas data dengan uji grafik p-plot :

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P

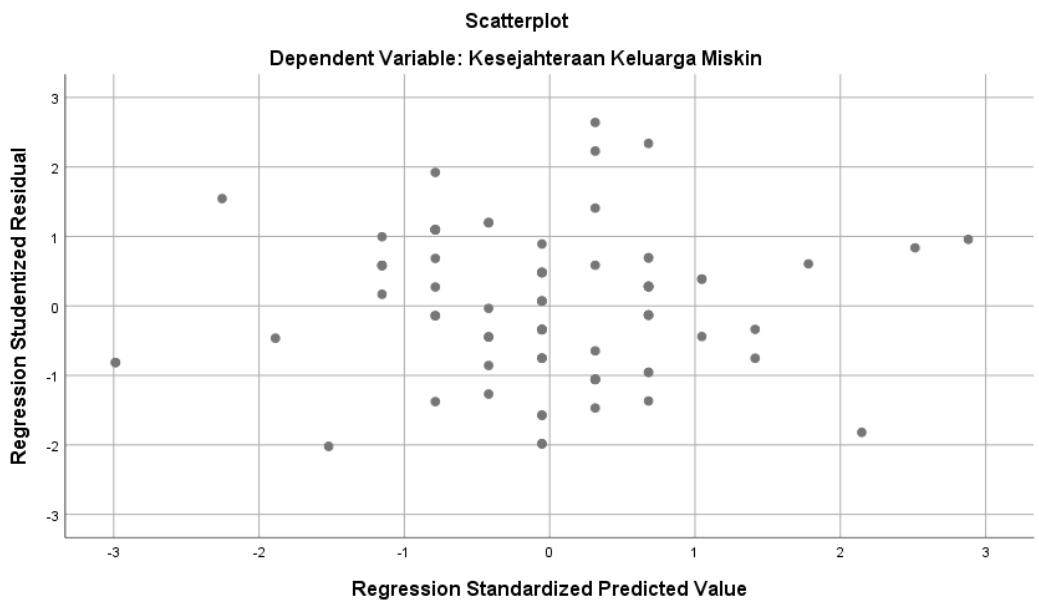


Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal plot terlihat titik – titik data menyebar di sekitar garis diagonal yang berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil menggunakan grafik *scatterplot* dengan melihat nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*



Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Dari Gambar 2 menunjukkan plots atau titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, sehingga dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji *statistic t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji *statistic t* antara variabel (X) terhadap variabel (Y) dengan SPSS 25 :

Tabel 4.8 Hasil Uji *Statistic t***Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	9,516	3,818		
Penyaluran					
Bantuan Pangan Non Tunai	,745	,100	,641	7,462	,000

Dependent Variable: Kesejahteraan Keluarga Miskin

Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji *statistic t* pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X) sebesar 7,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan $(dk) = N - K - 1 = 82 - 1 - 1 = 80$ adalah sebesar 1,990. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,462 > 1,990$) sehingga dapat disimpulkan bahwa

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk menganalisis ada tidaknya korelasi atau hubungan antara variabel. Selanjutnya, Tabel 10 menunjukkan hasil uji koefisien korelasi antara variabel X (Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai) dan variabel Y (Kesejahteraan Keluarga Miskin) dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 ^a	,410	,403	2,45037

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Keluarga Miskin

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,641 terletak di antara 0,600 – 0,799. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat. Dengan kata lain, variabel X (Penyaluran Bantuan Pangan

Non Tunai) dan variabel Y (Kesejahteraan Keluarga Miskin) memiliki hubungan atau korelasi yang kuat.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4.10 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 ^a	,410	,403	2,45037

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Bantuan Pangan Non

Tunai

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Keluarga Miskin

Sumber : Olah Data dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai R^2 yang dihasilkan sebesar $0.410 \times 100\% = 41,0\%$. Hal ini berarti 41,0% variabel dependen yaitu Kesejahteraan Keluarga Miskin (Y) dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X). Sedangkan 59,0% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya selain variabel Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin

Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) yaitu Bantuan pangan non tunai (BPNT) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kecamatan Grogol. Adapun untuk penjelasan variabel sebagai berikut:

Koefisien regresi variabel (X) 0,745 artinya jika variabel mengalami kenaikan 1 poin maka kesejahteraan keluarga miskin akan bertambah 0,745. Variabel Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (X) memiliki koefisien korelasi R sebesar 0,641 yang berarti tingkat hubungannya kuat. Untuk koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,410 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai mempunyai pengaruh 41,0% terhadap kesejahteraan keluarga miskin adapun sisanya 59,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui. Dan nilai t hitung sebesar 7.462 dan t tabel 1.990 menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan 0,05 maka H_1 diterima artinya penyaluran bantuan pangan non tunai

berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

Dengan demikian penelitian ini, dari hasil analisis perhitungan statistik menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen (penyaluran bantuan pangan non tunai) terhadap variabel dependen (kesejahteraan keluarga miskin). Hasil ini menunjukkan bahwa bantuan sosial yang semakin meningkat akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga miskin.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu⁷¹ yaitu penelitian yang dilakukan oleh Winriapita Purwati dari Universitas Hasanuddin tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”. Bahwasannya penelitian ini didasarkan atas 6 indikator, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dari hasil perhitungan 6 indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran raskin di kecamatan sumarorong kabupaten mamasa belum

⁷¹ Winriapita Purwati, “*Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong (Study Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa)*”

sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data rumah tangga sasaran penerima raskin dan rendahnya pengetahuan akan prosedur dan tujuan pelaksanaan penyaluran raskin baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana penyaluran raskin.

Halnya sama seperti penelitian yang dilakukan sekarang, bahwa peneliti juga menilai dari beberapa 6 indikator tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai dikelurahan grogol juga kurang maksimal karena terkadang tidak tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi. Namun keluarga yang menerima manfaat dari bantuan pangan non tunai tersebut merasa terbantu dengan program pemerintah ini dalam hal pangan, sehingga dapat dikatakan mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya.

Dan penelitian ini juga dikuatkan oleh teori ekonomi Islam (syari'ah), Islam menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial (perlindungan sosial) guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya negara menunaikan kewajiban ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk

melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Namun ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhannya atau ketika ada keadaan khusus dimanan negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja baginya, maka berlakulah bentuk yang kedua. Dalam hal ini bentuk yang kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup unruk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya kemudahan beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokonya. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil Rasulullah Saw. Yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secra materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan

sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya. (Syufa'at 2015).⁷²

D. Perspektif Islam Bantuan Sosial (perlindungan sosial) dan Kesejahteraan Keluarga Miskin

Bantuan pangan non tunai ataupun Perlindungan Sosial dari dalam perspektif Islam ada pada Al Quran yakni Q.S. Al Isra' ayat 26 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada kerabat dekatmu, dan orang miskin serta orang musyafir akan haknya masing-masing, dan jangan kamu membelanjakan hartamu secara boros (QS Al-Isra' : 26).

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa ayat teersebut memberi makna tentang pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak agar manusia yang bermatabat (*human dignity*). Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kemiskinan merupakan beban

⁷² Naerul Edwin Kiky Apriyanto, “ Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam, “ *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, (2017), 245-255.

bersama. Orang yang dalam keadaan miskin harus dibantu atas kemiskinan yang membelenggunya. (Qutb 1994)⁷³

Di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam memberikan perlindungan sosial terhadap warga negaranya salah satunya adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Setiap orang berhak atas perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhannya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non material. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakal kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya (Dahlan 2007).⁷⁴

Ayat-ayat Al Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan

⁷³ Naerul Edwin Kiky Apriyanto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Islam," *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, (2017), 257.

⁷⁴ Naerul Edwin Kiky Apriyanto.op.cit., 243-244

ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Dalam Q.S An-Nisa : 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (QS An-Nisa :58).

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Bahwasannya allah telah menjamin rejeki untuk semua orang beriman meskipun itu orang yang kurang mampu, karena diantara orang yang mampu itu ada hak untuknya. Allah Swt juga akan menyukai orang yang bisa menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan berlaku

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya supaya kamu mendapat ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,410. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penyaluran BPNT dapat menjelaskan kesejahteraan keluarga miskin sebesar 41,0%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,0% (100% - 41,0%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Dari hasil uji statistik melalui aplikasi SPSS diperoleh nilai t hitung variabel X (BPNT) sebesar (7.462) sedangkan nilai t tabel sebesar (1.990). Atau dengan kata lain H_0 ditolak dan H_1 diterima karena t hitung (7.462) > t table (1990). Maka, kesimpulan yang dihasilkan yaitu variabel penyaluran BPNT

(X) berpengaruh positif terhadap variabel kesejahteraan keluarga miskin (Y).

2. Maka dari hasil beberapa pengujian dan penelitian Bantuan Pangan Non Tunai mempengaruhi perubahan kehidupan keluarga miskin di kelurahan grogol terutama untuk keluarga yang tidak mampu.

B. Saran

1. Untuk penyelenggara penyaluran bantuan pangan non tunai kota cilegon atau dinas sosial agar lebih selektif lagi memilih orang yang berhak menerima bantuan. Diharapkan pergiliran orang yang menerima bantuan, benar-benar membutuhkan dan layak menerimanya.
2. Penelitian mengenai program kemiskinan, perlu dikembangkan lagi, untuk mengetahui kondisi masyarakat miskin dan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membantu masyarakat miskin, agar program bantuan yang diberikan lebih mendatangkan manfaat yang lebih bagi masyarakat miskin.